











2. Jika lahan mati tersebut dekat dengan satu daerah, arau masuk ke dalamnya maka seseorang tidak boleh memakmurkannya kecuali dengan izin pemerintah setempat. Sebab bias jadi lahan tersebut merupakan fasilitas kaum muslimin. Apabila dimiliki dan dimakmurkan, maka akan mengganggu mereka.
3. Barang mati di lahan mati misalnya garam atau minyak dan barang tambang lainnya tidak boleh dimiliki orang yang memakmurkannya karena barang tambang tersebut sangat terkait dengan kemashlaharan kaum muslimin. Karena Rasulullah SAW pernah memberikan tambang kepada seseorang, kemudian seseorang yang lain mengusulkan agar pemberian tersebut ditinjau ulang. Akhirnya beliau menarik kembali tambang garam tersebut kepada orang yang pernah diberinya.
4. Jika di lahan mati yang dihidupkan itu muncul air yang mengalir, maka ia lebih berhak kepadanya daripada orang lain. Ia boleh menggunakannya sesuai dengan kebutuhan sebelum siapapun dan selebihnya untuk kaum muslimin.
5. Membagi bagikan tanah menurut ajaran Islam,. Asal saja tanah itu belum menjadi milik seseorang atau suatu lembaga. Misalnya tanah yang dikuasai oleh Negara. Penguasaan tanah ini tergantung pada kebijakan pemerintah, apakah dimanfaatkan melalui perusahaan

























Misalnya tanah guna bangunan tidak dibenarkan untuk digunakan sebagai usaha pertanian, karena hak tersebut diadakan khusus bagi penyediaan tempat bangunan.

Dalam UUPA pasal 15 yang memuat bab hak pakai atas tanah berbunyi, bahwa memelihara termasuk menambah kesuburan serta mencegah rusaknya adalah kewajiban tiap tiap orang, dan badan hukum atau instansi yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah tersebut. Dengan memperhatikan pihak yang ekonominya lemah.

Dalam pasal 7 ditentukan bahwa setiap pemegang hak atas tanah dan pengusaha di perairan dalam wilayah sistem perlindungan penyangga kehidupan, wajib menjaga kelangsungan fungsi perlindungan wilayah tersebut.

Sistem penyangga kehidupan adalah suatu proses alamiah dari berbagai unsur hayati dan non hayati yang menjamin kelangsungan hidup makhluk di wilayah tersebut. Wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan ditetapkan oleh pemerintah. wilayah tersebut antara lain hutan lindung, daerah aliran sungai, areal tepi sungai, daerah tepi sungai, daerah pantai dan daerah pasang surut.

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup. Termasuk di dalamnya dan perilakunya. Lingkungan hidup merupakan suatu sistem yang meliputi





seringkali berpengaruh negatif terhadap alam. Manusia seringkali mengadakan eksploitasi terhadap alam tanpa memperhitungkan ketersediaan dan keterbatasan sumber daya alam. Jika hal ini diabaikan terus-menerus oleh manusia, maka akan terjadi kelangkaan sumber daya alam bahkan sumber daya alam akan habis.

Oleh karena sifatnya yang luas dan menyangkut kepentingan masyarakat secara keseluruhan, maka upaya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya merupakan tanggung jawab dan kewajiban Pemerintah serta masyarakat. Peran serta rakyat akan diarahkan dan digerakkan oleh Pemerintah melalui kegiatan yang berdaya guna dan berhasil guna. Untuk itu, Pemerintah berkewajiban meningkatkan pendidikan dan penyuluhan bagi masyarakat dalam rangka sadar konservasi.

Upaya pemanfaatan secara lestari sebagai salah satu aspek konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, belum sepenuhnya dikembangkan sesuai dengan kebutuhan; demikian pula pengelolaan kawasan pelestarian alam dalam bentuk taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam, yang menyatukan fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis

tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, dan pemanfaatan secara lestari.

Dengan alasan tersebut kegiatan-kegiatan konservasi akan lebih di tingkatkan dan lebih difokuskan pada tingkat penyelamatan ekosistem. Bagaimanapun waktu terus berlanjut dan ekosistem yang penting terus harus (wajib ) dipilih untuk kegiatan konservasi pada saat ini. Diharapkan atau dianjurkan bagi manusia dalam upaya penyelamatan 70 % keanekaragaman hayati yang ada didunia. Dengan demikian dapat dapat dianggap ekosistem dinegara-negara dunia mendapat perhatian. Satu pendekatan konservasi sumber daya alam didunia menggali wilayah wilayah potensi.

Undang-undang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang bersifat nasional dan menyeluruh sangat diperlukan sebagai dasar hukum untuk mengatur perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, dan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya agar dapat menjamin pemanfaatannya bagi kesejahteraan masyarakat dan peningkatan mutu kehidupan manusia.

Undang-undang ini memuat ketentuan-ketentuan yang bersifat pokok dan mencakup semua segi di bidang konservasi sumber daya alam



Berbagai tindakan yang sangat perlu, terkait hidup matinya matinya manusia tidak khususnya dengan demikian pendekatan kultur masyarakat modern maupun tradisional perlu adanya sikap tidak difokuskan pada hanya bagian tertentu yang penting saja yang mempunyai daya tarik, dan sumber daya alam yang dianggap terancam. Amat penting untuk meningkatkan kesadaran dan mengurangi ancaman terhadap sumber daya alam tersebut, tetapi jarang berhadapan langsung dengan masalah yang lebih mendasar dalam skala yang lebih luas yang berkaitan dengan hilangnya sumber daya alam pada umumnya. Dengan alasan tersebut kegiatan konservasi akan lebih ditingkatkan dan lebih difokuskan pada tingkat penyelamatan ekosistem.

Manusia harus menyadari bahwa sumber daya alam bukan hanya digunakan untuk kepentingan sekarang tetapi juga kesejahteraan anak cucu kita di masa depan. Untuk itu, perlu cara pengelolaan sumber daya alam yang benar agar kebutuhan manusia di masa depan dapat terpenuhi dengan sebaik-baiknya. Pengelolaan sumber daya alam adalah upaya terpadu untuk memelihara dan melestarikan ketersediaan sumber daya alam agar dapat dimanfaatkan secara optimal bagi manusia.

Berhasilnya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya berkaitan erat dengan tercapainya tiga sasaran konservasi, yaitu:

1. menjamin terpeliharanya proses ekologis yang menunjang sistem penyangga kehidupan bagi kelangsungan pembangunan dan kesejahteraan manusia (perlindungan sistem penyangga kehidupan);
2. menjamin terpeliharanya keanekaragaman sumber genetik dan tipe-tipe ekosistemnya sehingga mampu menunjang pembangunan, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang memungkinkan pemenuhan kebutuhan manusia yang menggunakan sumber daya alam hayati bagi kesejahteraan (pengawetan sumber plasma nutfah);
3. mengendalikan cara-cara pemanfaatan sumber daya alam hayati sehingga terjamin kelestariannya. Akibat sampingan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang kurang bijaksana, belum harmonisnya penggunaan dan peruntukan tanah serta belum berhasilnya sasaran konservasi secara optimal, baik di darat maupun di perairan dapat mengakibatkan timbulnya gejala



erosi genetik, polusi, dan penurunan potensi sumber daya alam hayati (pemanfaatan secara lestari).

Mengingat negara Indonesia adalah negara berdasar atas hukum, maka pengelolaan konservasi sumber daya alam hayati beserta ekosistemnya perlu diberi dasar hukum yang jelas, tegas, dan menyeluruh guna menjamin kepastian hukum bagi usaha pengelolaan tersebut.

Tujuan konservasi menurut undang-undang No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya adalah mengusahakan terwujudnya kelestarian sumber daya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia.